



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Ayu Ekamelasari Putri^{1*}, Sopiyan AR², Nurhasanah³

Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ayuekamelasari16062003@gmail.com

Diterima: 25-11-2025 | Disetujui: 05-12-2025 | Diterbitkan: 07-12-2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of the influence of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on the financial performance of provincial governments in Sumatra Island. The variables analyzed include PAD and Balancing Funds as independent variables that affect financial performance, while financial performance is the dependent variable influenced by these factors. The data in the study were obtained from the APBD realization report from 10 provincial governments in Sumatra Island covering the time period from 2019 to 2023. The study uses a quantitative method, this means that the sampling technique uses a saturated sampling technique. After collecting data, the analysis carried out aims to see and determine the relationship between the variables studied. The results obtained after processing data from the existing samples using Eviews 12 Software show that Regional Original Income has a positive effect on financial performance, and balancing funds have a negative effect on financial performance.

Keywords: Regional Original Income, Balancing Funds, Financial Performance.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Variabel yang dianalisis meliputi PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen yang berpengaruh kinerja keuangan, sementara kinerja keuangan menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Data dalam penelitian diperoleh dari laporan realisasi APBD dari 10 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera mencakup periode waktu dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, hal ini berarti teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Setelah mengumpulkan data, analisis yang dilakukan memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan variabel-variabel yang diteliti. Hasil yang didapat setelah melakukan pengolahan data dari sampel yang ada menggunakan Software Eviews 12 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ayu Ekamelasari Putri, Sopiyan AR, & Nurhasanah. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1801-1814. <https://doi.org/10.63822/z2q2pn58>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berfungsi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengelola pertumbuhan dan perkembangan seluruh wilayah secara komprehensif. Menurut Aliya dkk (2023) Undang-undang tersebut merupakan kerangka kerja yang kokoh dalam penerapan otonomi daerah sehingga memungkinkan setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Menurut Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat masyarakat. Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Di Indonesia, penerapan otonomi daerah melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Praktiknya, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu wilayah yang diberi kewenangan ini adalah **Pulau Sumatera**, yang terdiri dari sepuluh provinsi dengan karakteristik ekonomi yang beragam. Beberapa provinsi memiliki tingkat **PAD** yang relatif tinggi, sementara lainnya masih sangat bergantung pada **Dana Perimbangan** dari pemerintah pusat turut memengaruhi kinerja keuangan masing-masing provinsi.

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Luas wilayah yang mencakup sepuluh provinsi, Pulau Sumatera diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera mampu menggali potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Cara tersebut, diharapkan dapat meningkatkan PAD serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada di daerahnya. Menurut Halim (2020), Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. (Pratiwi, 2018) Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satunya

ialah rasio ketergantungan. Menerapkan rasio keuangan pada anggaran daerah mungkin menjadi salah satu cara untuk menentukan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah mereka secara finansial.

Tingkat ketergantungan Provinsi di Pulau Sumatera kepada pemerintah pusat bisa dikatakan tergolong tinggi. Untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan rasio ketergantungan daerah. Semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Sanga dkk,2018). Hal tersebut menandakan bahwa daerah telah mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Kinerja pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat, masih belum memuaskan. Meskipun implementasi otonomi daerah telah dimulai sejak 1 Januari 2001, namun hingga kini hanya sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil analisis atas rasio ketergantungan daerah tahun 2019, 10 dari 10 Provinsi masuk dalam kategori dengan angka rasio ketergantungan yang sedang. Di tahun 2020, 9 dari 10 provinsi masuk dalam kategori dengan angka rasio ketergantungan yang sedang, di tahun 2021, 10 dari 10 provinsi masuk dalam kategori dengan angka rasio ketergantungan yang sedang. Pada tahun 2022 dan 2023, 7 dari 10 Provinsi masuk dalam kategori dengan angka rasio ketergantungan yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi di Pulau Sumatera memiliki kemampuan keuangan yang rendah sehingga memiliki rasio ketergantungan keuangan yang sedang. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Sayadi (2020), yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan kinerja keuangan yang terletak di Pulau Sumatera.

Menurut Mardiasmo (2007) pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Diterimanya Dana Perimbangan oleh masing-masing daerah diatas 50 persen mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang mencerminkan sejauh mana daerah mampu menggali potensi ekonominya secara mandiri. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, penguatan PAD menjadi kunci keberhasilan otonomi fiskal. Beberapa penelitian seperti Natalia & Suprpto (2023) dan Sari (2023) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, studi lain seperti Putri & Darmayanti (2019) dan Azhar (2021) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan hasil yang belum konsisten.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana ini seharusnya dimanfaatkan secara efisien sebagai pelengkap bukan pengganti PAD. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Sumatera memiliki rasio ketergantungan fiskal di atas 50%

selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian seperti Lubis & Ningsih (2022) dan Novita & Arza (2024) bahkan menemukan bahwa dana perimbangan dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah, karena meningkatkan ketergantungan dan menurunkan insentif pengelolaan PAD secara optimal.

Fenomena yang terjadi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD belum cukup kuat untuk menekan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Rata-rata rasio ketergantungan fiskal provinsi-provinsi di Sumatera masih berada pada kategori sedang hingga tinggi, bahkan mencapai lebih dari 70% di beberapa daerah seperti Aceh dan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa otonomi fiskal belum sepenuhnya berjalan efektif dan belum tercapai kemandirian keuangan daerah secara optimal. Selain itu, dominasi belanja pegawai dalam struktur APBD mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan, memperparah rendahnya kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan kondisi empirik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2019–2023. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual mengenai efektivitas dua variabel utama tersebut dalam mendukung otonomi fiskal dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang beragam seperti Pulau Sumatera.

TINJAUAN PUSTAKA

Signalling Theory

Teori Sinyal yang dikemukakan oleh Michael Spence (1973), yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih (insider), seperti pemerintah daerah, perlu mengirimkan sinyal kepada pihak luar (masyarakat) guna mengurangi ketidakpastian informasi. Dalam konteks keuangan publik, teori ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyampaikan sinyal kepada publik melalui laporan keuangan yang andal dan kinerja keuangan yang transparan. Natalia dan Suprpto (2023) menambahkan bahwa pengungkapan informasi ini penting untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik, sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan dalam siklus anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Halim (2020) dan Novita & Arza (2024) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan alat evaluatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan rasio desentralisasi fiskal, efisiensi, dan efektivitas sebagai indikator kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan Digdowiseiso (2021), PAD menggambarkan

tingkat kemandirian fiskal daerah, yang apabila dikelola optimal, dapat meningkatkan kapasitas pembangunan.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang ditujukan untuk mendukung desentralisasi fiskal dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini penting untuk memastikan daerah tetap mampu menjalankan fungsi layanan publik meskipun dengan kemampuan fiskal yang berbeda-beda.

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada di suatu daerah. Pendapatan asli daerah bersifat khusus dan tidak akan memiliki nilai yang sama di setiap daerah, karena bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan yang dikumpulkan dari daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pemberi sumber pendanaan dan pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dalam pembiayaan usaha dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza, (2024) dan Simamora & Budiwitjaksono, (2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Azhar, (2021) dan Niswani., et al (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan merupakan implementasi dari prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memegang peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kenyataannya, tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Prastiwi & Aji (2020) berpendapat bahwa dana perimbangan memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan pemerintahan daerah dengan mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. Penelitian ini sejalan dengan Budianto et al, (2016) dan Novita & Arza (2024) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin banyak dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat menunjukkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2019 hingga 2023, yang terdiri dari 10 Provinsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019 hingga 2023 yang bersumber dari publikasi LHP LKPD tahun 2019 hingga 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	0.390400	12.37480	12.51460
Median	0.390000	12.42000	12.50000
Maximum	0.590000	12.86000	12.88000
Minimum	0.170000	11.83000	12.15000
Std. Dev.	0.100020	0.281492	0.194477
Skewness	-0.154364	-0.214891	-0.027553
Kurtosis	2.932366	2.110944	2.108657
Jarque-Bera	0.208100	2.031529	1.661517
Probability	0.901180	0.362125	0.435719
Sum	19.52000	618.7400	625.7300
Sum Sq. Dev.	0.490192	3.882648	1.853242
Observations	50	50	50

Dari Tabel 1 diketahui jumlah data yang berhasil diolah sebanyak 50 data. Untuk variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah daerah nilai standar deviasi 0.100020 dan rata-rata 0.390400. Nilai minimum dari variabel ini yaitu 0.17 dan nilai maksimum sebesar 0.59. Variabel independen diantaranya, pendapatan asli daerah hasil statistik deskriptif diperoleh standar deviasi 0.281492 dengan rata-rata 12.37480, nilai minimum sebesar 11.83, nilai tertinggi 12.86. Dana perimbangan dengan standar deviasi sebesar 0.194477 dengan rata-rata 12.51. Nilai terkecil 12.15 dan nilai terbesar 12.88.

Uji Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	70.075118	(9,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	143.385678	9	0.0000

Hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section F* sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

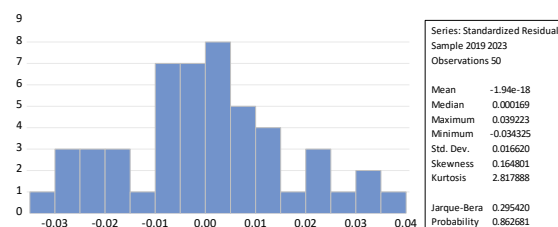
Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.048072	2	0.0001

Hasil dari uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random* sebesar $0,0001 < 0,05$, artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas



Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai prob lebih besar dari 0,05 yakni 0,862681, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.523561	5191.182	NA
X1	0.006454	9803.304	4.967012
X2	0.013574	21083.87	4.967012

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai VIF X1 (4,967012) dan X2 (4,967012) lebih kecil dari pada 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.112728	Prob. F(2,47)	0.8936
Obs*R-squared	0.238701	Prob. Chi Square(2)	0.8875
Scaled explained SS	0.580275	Prob. Chi-Square(2)	0.7482

Hasil dari table 6 diatas bahwa nilai probability dari tiap variabel bebas adalah lebih dari (>) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Uji Autokorelasi

R-squared	0.509792	Mean dependent var	0.390267
Adjusted			
R-squared	0.488932	S.D. dependent var	0.099334
S.E. of regression	0.071013	Akaike info criterion	-2.393794
Sum squared resid	0.237011	Schwarz criterion	-2.279073
Log likelihood	62.84485	Hannan-Quinn criter.	-2.350107
F-statistic	24.43879	Durbin-Watson stat	0.340993
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 6 hasil uji Durbin – Watson diperoleh Durbin – Watson sebesar 0.340993, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai table Durbin – Watson (DW) dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05, jumlah pengamatan sampel 50 (n) dan jumlah variabel independennya 2 (k=2). Nilai Durbin – Watson berada diantara nilai Du dan 2-dU yaitu dU = 1.6283 dan 2-dU yaitu 2 – 1.6283 = 0.3717 (0.3717 < 0.340993 < 1.6283). Hal ini berarti tidak ada masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.657632	0.901668	-7.383684	0.0000
X1	0.772118	0.043374	17.80155	0.0000
X2	-0.200307	0.050160	-3.993365	0.0003

$$Y = -6.657632 - 0.772118 - 0.200307 + e$$

Berdasarkan tabel 7 PAD memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai sebesar 0.772118 dan dana perimbangan memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai sebesar -0.200307.

Koefisien Determinasi Adjusted (R²)

Tabel 8. R² Adjusted

R-squared	0.972387
Adjusted R-squared	0.964394
S.E. of regression	0.018873
Sum squared resid	0.013536
Log likelihood	134.4145
F-statistic	121.6520
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 8 Nilai Adjusted R Square pada Tabel 5 sebesar 0,964394, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sebagai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah sebesar 0,964 atau 96,4%. Untuk sisanya yaitu ,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Uji Simultan

R-squared	0.972387
Adjusted R-squared	0.964394
S.E. of regression	0.018873
Sum squared resid	0.013536
Log likelihood	134.4145
F-statistic	121.6520
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai F-hitung sebesar 121.6520 dengan nilai probabilitas 0.000000 Nilai F-hitung tersebut dibandingkan dengan nilai F-tabel, Nilai f-tabel dapat dilihat pada tabel F pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 50-2-1 = 47 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F-tabel sebesar 3.195056. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung memiliki nilai yang lebih besar dari nilai Ftabel ($121.6520 < 3.19$), dan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,000000 < 0.05$.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.657632	0.901668	-7.383684	0.0000
X1	0.772118	0.043374	17.80155	0.0000
X2	-0.200307	0.050160	-3.993365	0.0003

Berdasarkan hasil tabel 10 diperoleh jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil ($<$) dari 0.05 (α) atau t-hitung lebih besar ($>$) t-tabel pada taraf signifikansi 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi $0.05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$ atau $50-2-1=47$, dan hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar **2.011741**. Tabel 7 dapat dilihat untuk pendapatan asli daerah nilai sig. 0,000, Nilai sig. 0,000 $<$ probabilitas 0,05, nilai thitung $17.80155 >$ t-tabel 2.011741, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada variabel dana perimbangan memiliki nilai sig. 0,000, nilai koefisien β bernilai negatif yaitu -3.99665 dan dengan t-tabel sebesar 2.011741. Nilai sig. 0,0003 $<$ probabilitas 0,05, thitung $-3.99665 >$ t-tabel 2,011, artinya dana perimbangan berpengaruh negatif secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-hitung $<$ t-tabel ($17.80155 > 2.011741$). Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dan H_1 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Dalam konteks ini, tingginya kontribusi PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan PAD yang tinggi umumnya memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Namun demikian, pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan hanya akan optimal apabila didukung oleh kebijakan belanja yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan kata lain, meskipun PAD berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan, efektivitasnya sangat ditentukan oleh bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan dikelola. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam manajemen anggaran daerah, khususnya dalam merancang belanja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Keselarasan antara peningkatan PAD dan strategi belanja yang produktif akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan akuntabel di wilayah Sumatera.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza, (2024) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar ataupun kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan provinsi di pulau sumatera. Hal yang sama dikemukakan oleh Simamora & Budiwitjaksono (2022), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau sumatera. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azhar, (2021) dan Niswani., et al, (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji parsial (uji-t) yang menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Dana Perimbangan sebesar -3.99665, yang lebih besar secara mutlak dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2.011741. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara statistik, Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis penelitian H3 diterima (H_a diterima dan H_o ditolak). Artinya, semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka kinerja keuangan daerah tersebut cenderung menurun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan dapat menjadi penghambat dalam upaya pencapaian prinsip otonomi daerah yang sejati. Ketika suatu daerah terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat juga dapat mengindikasikan lemahnya motivasi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan mandiri. Dengan kata lain, Dana Perimbangan yang besar justru dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja keuangannya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Arza (2024), serta Budianto et al. (2016), yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah yang bergantung pada dana pusat cenderung menunjukkan performa keuangan yang kurang optimal, baik dari segi efektivitas pengelolaan anggaran maupun efisiensi belanja publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi PAD, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan belanja yang produktif agar dapat meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Pendapatan Asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. (1) Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. (2) Hasil analisis menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. (3)

Pemerintah daerah diharapkan harus dapat menggali potensi daerahnya misalnya dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan meminimalkan penggunaan dana perimbangan untuk membangun kemandirian daerah otonom. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variable tambahan yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan memperpanjang perbedaan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). *Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Aliya, W. R., Yulsiati, H., & Aryani, Y. A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(2), 1924–1933. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4272>
- Azhar, I. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa*. Jurnal Transformasi Administrasi, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019-2023*
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). *Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(4), 844–851.
- Digdowniseiso, K. (2021). *The Effects of Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, and Return on Assets on Stock Prices in Banking Sector over the Period 2015 – 2019*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November, 11286–11293. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3190/pdf>
- Ghozali. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dan Ekonometrika dengan Program E Views 10 Edisi 2*. Universitas Diponogoro.
- Halim, A. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta:

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). *Enrichment: Journal of Management is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) Enrichment: Journal of Management Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indo*. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385–2390.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Natalia, & Suprpto, N. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). *Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. In Alfabeta. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>